



LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG

2014



**DINAS SOSIAL
KABUPATEN BULELENG**

<http://dinsos.bulelengkab.go.id>

KATA PENGANTAR

Atas Asung Kerta Wara Nugraha Ida Hyang Widhi Wasa, bahwa penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2014 telah disusun sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan selama satu tahun yakni tahun 2014 yang diselenggarakan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng sebagai bahan evaluasi kinerja dalam penyusunan dan pelaksanaan kegiatan tahun 2015 dan tahun-tahun mendatang. Dengan segala kekurangan yang ada, tentunya LAKIP ini memiliki banyak kelemahan dan kekurangan sehingga akan sangat diharapkan untuk bisa diberikan koreksi atas laporan ini.

Akhir kata, kami haturkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkerja keras turut membantu kesuksesan pelaksanaan program dan tujuan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng.

Singaraja, 07 Januari 2015

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

DRS . GEDE KOMANG M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19591231 198503 1 212

Daftar Isi

Halaman judul	i
Kata pengantar	ii
Daftar isi	iii
Ringkasan Eksekutif	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	3
D. Kondisi SKPD	3

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategik	5
1. Visi	6
2. Misi	8
3. Tujuan	10
4. Sasaran	10
5. Kebijakan	11
6. Program	12
B. Rencana Kinerja tahun 2014	13
1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	13
2. Penetapan Kinerja	16

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2014

A. Pengukuran Kinerja	18
B. Evaluasi Kinerja	23
C. Analisis Kinerja	30

BAB IV PENUTUP

A. Tinjauan Umum	32
B. Tinjauan Khusus	32
C. Kendala/Masalah Yang Dihadapi	33
D. Rencana Pemecahan Masalah	34
E. Saran Tindak Lanjut	34

Lampiran-lampiran :

1. Perjanjian Kinerja (Penetapan Kinerja) Tahun 2014
2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014 .
3. Pengukuran Kinerja Tahun 2014
4. Analisis Efisiensi dan Efektifitas Kegiatan Tahun 2014

RINGKASAN EKSEKUTIF

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menginstruksikan kepada :

1. Para Menteri
2. Panglima Tentara Nasional Indonesia
3. Gubernur Bank Indonesia
4. Jaksa Agung
5. Kepala Kepolisian Republik Indonesia
6. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen
7. Para Pimpinan Sekretariat Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara
8. Para Gubernur
9. Para Bupati / Wali Kota

Untuk :

PERTAMA : Melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggung jawaban Instansi Pemerintah dalam mencapai Misi dan tujuan organisasi.

KEDUA : Pada tanggal 30 September 1999, setiap Instansi Pemerintah sampai tingkat eselon II telah mempunyai Perencanaan Kerja SKPD tentang program-program utama yang akan dicapai selama 1 (satu) tahun.

KETIGA : Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam diktum **KEDUA** mencakup :

1. Uraian tentang Visi, Misi, Strategi dan faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi.
2. Uraian tentang tujuan, sasaran dan aktifitas Organisasi
3. Uraian tentang cara mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

KEEMPAT : Pada setiap akhir tahun anggaran, mulai Tahun Anggaran 2000 / 2001, setiap instansi menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada Presiden dan salinannya

kepada Kepala Badan Pengawasan dan Pembangunan dengan menggunakan pedoman penyusunan sistem akuntabilitas kinerja.

- KELIMA** : Kepala Lembaga Administrasi Negara ditugaskan untuk :
1. Membuat pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah paling lambat awal tahun 2000 / 2001.
 2. Memberikan bantuan teknis dan penyuluhan tentang pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- KEENAM** : Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melakukan evaluasi terhadap pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan melaporkan kepada Presiden melalui Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan salinannya kepada Kepala Lembaga Administrasi Negara.
- KETUJUH** : Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara mengkoordinasikan pelaksanaan Instruksi Presiden ini.

Untuk memenuhi Inpres tersebut di atas, maka Dinas Sosial Kabupaten Buleleng membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 untuk disampaikan kepada Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng yang akan dijadikan bahan dalam pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2014.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Dinas Sosial Kabupaten Buleleng ini dibuat berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2014 dengan Tujuan dan Sasaran sebagai berikut :

1. Tujuan :
 - 1) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang terpadu, baik intern maupun ekstern lembaga;
 - 2) Mengetahui secara dini dan munculnya kerawanan sosial;

- 3) Mencegah terhadap munculnya kerawanan sosial;
- 4) Mengidentifikasi dan menginventarisasi kerawanan sosial diseluruh wilayah Kabupaten Buleleng;
- 5) Pemetaan lokasi kerawanan sosial diseluruh wilayah Kabupaten Buleleng;
- 6) Meningkatkan aksesibilitas dan pemberdayaan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- 7) Meningkatkan aksesibilitas dan pemberdayaan bagi karang taruna dan pekerja sosial;
- 8) Meningkatkan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan/kejuangan

2. Sasaran :

Sasaran yang ingin dicapai :

- 1) Meningkatnya koordinasi dan kerjasama yang semakin mantap dalam penanggulangan masalah sosial;
- 2) Diketuinya/terdeteksinya secara dini terhadap munculnya kerawanan sosial;
- 3) Dapat dicegahnya terhadap munculnya kerawanan sosial;
- 4) Teridentifikasinya dan terinventarisasinya kerawanan sosial diseluruh wilayah Kabupaten Buleleng;
- 5) Terpetakannya lokasi dan jenis kerawanan sosial diseluruh wilayah Kabupaten Buleleng;
- 6) Meningkatnya aksesibilitas dan pemberdayaan bagi penyandang masalah sosial ;

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lahirnya PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan PP No. 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagai pelaksana UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan konsekuensi dalam perubahan terminologi pembagian urusan pemerintah.

Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (*basic services*) bagi masyarakat, seperti masalah sosial, pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan dan sebagainya. Sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintahan daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (*core competence*) yang menjadi kekhasan daerah. Urusan pemerintahan di luar urusan wajib dan urusan pilihan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, sepanjang menjadi kewenangan daerah yang bersangkutan tetap harus diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

Namun mengingat terbatasnya sumber daya dan sumber dana yang dimiliki oleh daerah, maka prioritas penyelenggaraan urusan pemerintahan difokuskan pada urusan wajib dan urusan pilihan yang benar-benar mengarah pada penciptaan kesejahteraan masyarakat disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan kekhasan daerah yang bersangkutan.

Salah satu urusan wajib yang menjadi urusan Pemerintah Kabupaten adalah urusan sosial . Untuk itu sebagai tindak lanjut, terjadi perubahan struktur organisasi dari Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Buleleng menjadi Dinas Sosial Kabupaten Buleleng berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan dan Tata

Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng dan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 tahun 2011 sebagai perubahannya .

B. Dasar Hukum

Dasar Hukum sebagai landasan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun anggaran 2014 yaitu :

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pusat.
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
9. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Kabupaten Buleleng 2012-2017

C. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014 adalah :

1. Untuk mengetahui kegiatan yang telah dilaksanakan;
2. Untuk mengetahui perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan berikut hasil pengolahan dan evaluasi;

3. Sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya;
4. Untuk tertibnya pengadministrasian kegiatan;
5. Sebagai bukti laporan program dan hasil kegiatan kepada publik.

D. Kondisi SKPD

Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng yang selanjutnya dilaksanakan perubahan dengan PERDA Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dan Sesuai dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 43 Tahun 2008 tentang tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Buleleng yang selanjutnya dilaksanakan perubahan dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 32 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 43 tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Buleleng mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang sosial .

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Dinas Sosial melaksanakan fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan teknis dibidang sosial berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati ;
- b. Pelaksanaan pencegahan terhadap timbulnya permasalahan sosial ;
- c. Pelaksanaan Rehabilitasi penyandang permasalahan sosial ;
- d. Pemberian pelayanan sosial dan pemberdayaan sosial ;
- e. Pemberian perijinan di bidang sosial sesuai dengan kewenangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- f. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah ;
- g. PengelolaanTata Usaha Dinas .

Susunan Kepegawaian

Selanjutnya dapat dilihat susunan kepegawaian dan kelengkapan, seperti berikut ini :

1. Kondisi kepegawaian

Susunan pegawai Dinas Sosial Kabupaten Buleleng berjumlah 122 orang, terdiri dari 33 Tenaga PNS , 3 orang Tenaga Honorarium dan 86 Tenaga Kontrak Kerja , dengan susunan yaitu :

- a. Kepala Dinas : 1 orang
- b. Sekretaris : 1 orang
- c. Kepala Bidang : 4 orang
- d. Kepala Sub Bagian : 3 orang
- e. Kepala Seksi : 12 orang
- f. Kepala UPTD Tri Yudha Sakti : 1 orang
- g. Kepala Tata Usaha UPTD Tri Yudha Sakti : 1 orang
- h. Bendahara : 1 orang
- i. Pembantu Bendahara : 2 orang
- j. Pejabat Penatausahaan Keuangan : 7 orang
- k. Tenaga Honor dan Tenaga Kontrak : 89 orang

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategik

Sesuai dengan Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diisyaratkan bahwa baik Pemerintah Kabupaten maupun Propinsi wajib menyusun Dokumen perencanaan baik RPJPD, RPJMD maupun RKPD. Sedangkan pada tingkat kelembagaan ataupun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diamanatkan untuk menyusun Rencana Strategik (Renstra) yang merupakan rencana pembangunan lima tahunan yang memuat Visi, Misi, Tujuan Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta dalam penyusunannya berpedoman pada RPJM Daerah, RPJP Daerah maupun RPJM Nasional dan RPJP Nasional. Penyusunan Renstra SKPD ini dimaksudkan untuk :

1. Terwujudnya konsistensi dan integrasi perencanaan pembangunan lingkup SKPD
2. Terarahnya sasaran kinerja SKPD
3. Tersedianya pedoman dalam penyusunan rencana kerja (Renja) tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) maupun LAKIP SKPD.

Terkait dengan maksud penyusunan Renstra diatas, maka SKPD Dinas Sosial sebagai bagian dari system pembangunan yang berfungsi melaksanakan kewenangan dibidang sosial tentunya akan mengarahkan Renstranya pada pencapaian pencegahan , rehabilitasi , pelayanan dan pemberdayaan sosial.

Untuk mewujudkan Rencana Strategis tentu perlu ditunjang oleh Visi dan Misi yang rasional. Untuk itu dapat diperhatikan Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Buleleng .

1. Visi dan Misi :

1.1. Visi :

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, maka visi yang ditetapkan *adalah "Terwujudnya Peningkatan Pemberdayaan,*

Pelayanan dan Kesejahteraan Penyandang Masalah Sosial Berdasarkan Falsafah Tri Hita Karana“.

Visi ini mengandung maksud, antara lain :

- 1.1. Setiap kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial senantiasa mengedepankan hubungan yang harmonis sesama penyandang masalah sosial dan masyarakat serta lingkungannya termasuk bhakti kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 1.2 Para Penyandang Masalah Sosial dan Masyarakat diharapkan mampu meningkatkan dan mengembangkan potensinya didalam mewujudkan kesejahteraan sosial baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain.

Selain kedua maksud tersebut diatas, perlu juga disampaikan batasan pengertian terhadap beberapa hal yang berkaitan Visi dimaksud, seperti :

- *Pemberdayaan* mempunyai makna suatu proses dimana masyarakat khususnya mereka yang kurang memiliki akses kepada sumber daya pembangunan didorong untuk meningkatkan kemandirian dalam mengembangkan perikehidupan mereka. Jadi pemberdayaan masyarakat lebih merupakan suatu proses ketimbang sebuah pendekatan cetak biru. Pemberdayaan Masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mengembangkan perikehidupan mereka. Secara langsung, pendekatan ini bertujuan untuk (1) meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menemukenali dan memprakarsai kegiatan untuk memecahkan permasalahan yang mereka hadapi dengan menggunakan sumber daya (modal, keahlian, pengetahuan, keuangan) mereka sendiri dengan cara yang berkelanjutan; (2). meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap kesinambungan program dan kegiatan pembangunan mereka sendiri; dan (3) meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menilai sumber daya yang bisa mendukung kegiatan-kegiatan mereka;
- *Kesejahteraan/Sejahtera*, mengandung makna bahwa pemerintah dan komponen pembangunan lainnya dalam melaksanakan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesejahteraan dinilai berdasarkan berbagai ukuran ataupun indikator. Kesejahteraan dilihat dari tingkat perkembangan ekonomi makro, indikasinya adalah semakin terciptanya lapangan kerja; laju pertumbuhan ekonomi semakin meningkat, Perkembangan PDRB Daerah dan Perkapita yang semakin meningkat.

Demikian juga indikasinya terlihat dari tingkat pendapatan riil dan daya beli masyarakat yang semakin meningkat serta distribusi pendapatan yang semakin merata di masyarakat. Lebih tinggi tingkat pendapatan dan distribusinya lebih merata ke masyarakat, maka suatu daerah dikatakan lebih makmur, dan dengan demikian lebih sejahtera. Selain diukur berdasarkan indikator ekonomi, tingkat kesejahteraan suatu daerah juga diukur berdasarkan berbagai indikator sosial yang pada umumnya berkaitan dengan kualitas sumberdaya manusia. Daerah dikatakan sejahtera apabila makin tinggi tingkat pendidikan penduduknya. Hal itu tercermin pada tingkat pendidikan terendah serta tingkat partisipasi pendidikan masyarakat; demikian juga tercermin dari jumlah tenaga ahli/ profesional yang dihasilkan oleh sistem pendidikan. Kesejahteraan suatu daerah juga diukur berdasarkan indikator derajat kesehatan yang indikasinya terlihat dari semakin meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan meningkatnya umur harapan hidup. Secara garis besar bahwa kesejahteraan yang semakin meningkat tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang semakin meningkat yang indikatornya mencakup: daya beli masyarakat; Kesehatan/Umur Harapan Hidup semakin meningkat serta Tingkat Pendidikan masyarakat yang semakin tinggi dilihat dari lama pendidikan dan orang dewasa melek huruf. Daerah yang sejahtera ditandai dengan laju pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi dan berkualitas, laju pertumbuhan penduduk yang semakin rendah, angka harapan hidup yang lebih tinggi, dan kualitas pelayanan sosial yang lebih baik.

- *Pelayanan* mempunyai makna bagaimana memberikan kemudahan sehingga mereka/penyandang masalah sosial dapat mengakses apa yang menjadi kebutuhannya secara transparan, mudah dan cepat.
- *Penyandang Masalah Sosial* mempunyai makna setiap orang/masyarakat yang berada dibawah kondisi ideal dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya.
- *Falsafah Tri Hita Karana* mempunyai makna tiga Faktor Penyebab Kebahagiaan yang mencakup hubungan manusia dengan Sang pencipta/Tuhan/Ida Shanghyang Widhi Wasa (Prahyanan); Hubungan Manusia dengan Manusia (Pawongan); serta hubungan Manusia dengan Lingkungannya (Palemahan). Intinya bahwa berbagai aspek pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat senantiasa dilandasi hubungan yang harmonis baik antara pelaku pembangunan (manusia dengan manusia/Pawongan); pelaku pembangunan dengan lingkungan serta senantiasa mengedepankan pelestarian dan keberlanjutan (Manusia dengan Lingkungan/Palemahan); serta pelaku pembangunan harus senantiasa

menyadari dan bersyukur bahwa apa yang ada di bumi adalah semuanya ciptaan Tuhan/Ida Sang Hyang Widhi Wasa (Manusia dengan Tuhan/Pahryangan).

2. 1. Misi :

Misi yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan koordinasi dan kerjasama yang terpadu, baik intern maupun ekstern lembaga;
2. Melaksanakan deteksi dini dan pencegahan terhadap munculnya kerawanan sosial;
3. Pemetaan kerawanan sosial diseluruh wilayah Kabupaten Buleleng;
4. Peningkatan aksesibilitas, pemberdayaan dan pemberian bantuan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, potensi sumber kesejahteraan sosial (karang taruna , pekerja sosial, dan lain-lain);
5. Pelesetarian nilai-nilai kepahlawanan/kejuangan

Penjelasan Makna Misi

- a. Misi yang pertama mempunyai makna bahwa melalui koordinasi dan kerjasama yang terpadu, akan terwujud penanganan masalah sosial yang terintegrasi dan terpadu antara kelembagaan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan maupun dalam pengendalian/pencegahan terhadap timbulnya masalah kerawanan social;
- b. Misi kedua mempunyai makna bahwa untuk dapat diketahui dan tidak munculnya kerawanan sosial maka perlu dilakukan deteksi dan pencegahan terhadap masalah social ;
- c. Misi yang ketiga mempunyai makna bahwa dengan adanya pemetaan kerawanan sosial akan teridentifikasi dan terinventarisasi mengenai jenis, lokasi, sumber kerawanan sosial yang mungkin muncul atau berkembang dimasyarakat ataupun diwilayah Kabupaten Buleleng ;
- d. Misi yang keempat mempunyai makna bahwa masyarakat khususnya mereka yang kurang memiliki akses kepada sumber daya

pembangunan didorong untuk meningkatkan kemandirian dalam mengembangkan perikehidupannya, dalam hal ini diberikan kemudahan, diberdayakan dan diberikan bantuan sehingga mampu mengatasi sendiri secara mandiri terhadap kondisi keluarga dan lingkungannya ;

- e. Misi yang kelima mempunyai makna bahwa perlu ditingkatkan apresiasi dan kepedulian serta pelestarian terhadap nilai-nilai kepahlawanan/kejuangan

2. Tujuan dan Sasaran :

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, adalah :

1. Tujuan :

- 9) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang terpadu, baik intern maupun ekstern lembaga;
- 10) Mengetahui secara dini dan munculnya kerawanan sosial;
- 11) Mencegah terhadap munculnya kerawanan sosial;
- 12) Mengidentifikasi dan menginventarisasi kerawanan sosial diseluruh wilayah Kabupaten Buleleng;
- 13) Pemetaan lokasi kerawanan sosial diseluruh wilayah Kabupaten Buleleng;
- 14) Meningkatkan aksesibilitas dan pemberdayaan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- 15) Meningkatkan aksesibilitas dan pemberdayaan bagi karang taruna dan pekerja sosial;
- 16) Meningkatkan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan/kejuangan

2. Sasaran :

Sasaran yang ingin dicapai :

- 7) Meningkatnya koordinasi dan kerjasama yang semakin mantap dalam penanggulangan masalah sosial;
- 8) Diketahuinya/terdeteksinya secara dini terhadap munculnya kerawanan sosial;
- 9) Dapat dicegahnya terhadap munculnya kerawanan sosial;
- 10) Teridentifikasinya dan terinventarisasinya kerawanan sosial diseluruh wilayah Kabupaten Buleleng;
- 11) Terpetakannya lokasi dan jenis kerawanan sosial diseluruh wilayah Kabupaten Buleleng;
- 12) Meningkatnya aksesibilitas dan pemberdayaan bagi penyandang masalah sosial ;

3.Kebijakan :

Penetapan kebijakan akan dapat mengarahkan pada kondisi-kondisi dimana seluruh elemen mengetahui tentang apa peran dan tanggung jawab masing-masing elemen dalam mewujudkan visi dan misi serta tujuan dan sasaran dimaksud. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka rumusan kebijakan pembangunan bidang sosial adalah sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan koordinasi internal dan eksternal kelembagaan dalam penanganan masalah social;
- b. Penyediaan sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penanggulangan bencana dan pasca bencana maupun masalah sosial lainnya;
- c. Menetapkan jalur dan ruang evakuasi bagi penduduk rawan terkena bencana;
- d. Pengkajian dan Pemetaan kerawanan sosial dalam rangka mitigasi bencana social atau bencana alam;
- e. Meningkatkan profesionalisme pelayanan sosial baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat ataupun dunia usaha dalam penanganan masalah sosial;
- f. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam melaksanakan pelayanan sosial bagi para penyandang masalah sosial/masyarakat miskin;

- g. Meningkatkan dan pemerataan pelayanan sosial bagi penyandang masalah sosial
- h. Meningkatkan peran dan partisipasi kelembagaan dan masyarakat dalam penggalian, pengembangan dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan/kejuangan

4. Program :

Program yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan dan sasaran yaitu :

1. Program Pemberdayaan fakir Miskin , Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya , program ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dan keberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya .
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial , yang bertujuan untuk memulihkan fungsi sosial dan memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
3. Program Pembinaan Anak terlantar , program ini ditujukan untuk pemberian pelayanan sosial demi kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya anak terlantar ;
4. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma, dengan tujuan guna memulihkan fungsi sosial para penyandang cacat sehingga dapat dan mampu mandiri layaknya orang normal ;
5. Program Pembinaan Panti Asuhan/Jompo, program ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanganan para anak yatim piatu terlantar dan jompo/ lanjut usia terlantar
6. Program Pembinaan Eks Penyandang penyakit Sosial, program ini ditujukan untuk memulihkan fungsi sosial dan memberikan pelayanan sosial bagi para penyandang penyakit sosial (Eks Napi, WTS, Korban Napza, Waria, Korban HIV/AIDS, Gepeng dan penyakit sosial lainnya);
7. Program pemberdayaan kelembagaan sosial , program ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan, kepedulian dan ketahanan sosial masyarakat, organisasi sosial (orsos) kemasyarakatan, keluarga miskin dan dunia usaha ;
8. Program pelestarian nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial , program ini ditujukan untuk menanamkan nilai-nilai kepahlawanan , kejuangan dan

kesetiakawanan sosial bagi generasi muda dan masyarakat secara keseluruhan .

B. Rencana Kinerja Tahunan

B.1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) :

Dalam rencana kinerja tahunan SKPD terdapat sasaran yang ingin dicapai berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) , Yaitu :

1. Terwujudnya peningkatan pelayanan sosial
2. Terwujudnya pengembangan potensi kesejahteraan sosial.
3. Tertanganinya secara cepat masalah-masalah bencana

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk strategi pencapaian sasaran di Tahun 2014 , yaitu :

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya,

dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Peningkatan Kemampuan (capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya .
- b. Pengadaan Sarana Prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin.

2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial , dengan kegiatan yang dilaksanakan

- a. Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak.
- b. Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial bagi Penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- c. Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal.

- d. Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa.
 - e. Pembinaan dan bimbingan motivasi kepada Lansia di Luar Panti.
- 3. Program Pembinaan Anak Terlantar**, dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah
- a. Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar .
- 4. Program pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma**, dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah
- a. Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma.
 - b. Pendayagunaan penyandang cacat dan eks trauma.
- 5. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo**, dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah
- a. Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo dan pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo.
- 6. Program Pembinaan Eks penyandang penyakit sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya)**, dengan kegiatan yang dilaksanakan yaitu
- a. Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial .
 - b. Pemberdayaan eks penyandang Penyakit Sosial
- 7. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial** , dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah :
- a. Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha.
 - b. Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat .
 - c. Peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan sosial masyarakat .
 - d. Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial.
- 8. Program pelestarian nilai Kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial**, dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Penanaman Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial
- b. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) dan Monumen / Tugu Perjuangan
- c. Pemeliharaan Monumen Perjuangan Tri Yudha Sakti

Adapun secara rinci RKT Dinas Sosial Tahun 2014 kami sampaikan dalam lampiran Lakip terlampir .

B.2. Perjanjian Kinerja (Penetapan Kinerja) :

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka Dinas Sosial setiap tahun melaksanakan kegiatan melalui program dalam Perjanjian Kinerja atau Penetapan Kinerja . Adapun Penetapan Kinerja ini dibuat baik dengan Program Pilihan maupun Program Wajib sebagaimana Lampiran Lakip terlampir .

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang di maksud, yang ditetapkan dalam Visi dan Misi Dinas Sosial kabupaten Buleleng . Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang Sistematis dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja Kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil,

Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran dan penilaian dalam proses penyusunan/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran tujuan.

Pada pembahasan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014 ini ada 3 aspek yang akan dibahas, yaitu :

1. Pengukuran Kinerja ;
2. Evaluasi Kinerja ;
3. Analisis Kinerja .

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan kegiatan dipergunakan nilai makna dari nilai tersebut, yaitu :

- 90 -100 = Amat baik
- 80 -89 = Baik
- 50 -79 = Cukup baik
- < 49 = Kurang

Penjelasan lebih lanjut untuk ketiga aspek tersebut , adalah sebagai berikut :

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran Kinerja adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian sasaran dan pencapaian target kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng.

Adapun uraian pengukuran kinerja yang dicapai berdasarkan Misi dan sasaran yang telah ditetapkan yaitu :

- a. *Misi 1 : Meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang terpadu, baik intern maupun ekstern lembaga;*

Sasaran yang hendak dicapai dari Misi tersebut sebagai berikut :

- 1). Meningkatkan Koordinasi dan kerjasama yang semakin mantap dalam penanggulangan masalah sosial.

Indikator Kinerja untuk Misi 1 :

No	Indikator Kinerja/Sasaran	Satuan	Tahun 2014		Capaian Kinerja Tahun 2014 (%)
			Target	Realisasi	
1.	Meningkatnya keterampilan dan keberdayaan eks penyandang penyakit social (gepeng , PSK , eks Napi dll)	Or/gepeng	60	50	83,3 %
		Or/Eks Napi	10	10	100 %
2	Meningkatnya perlindungan kesosialan khususnya kemiskinan melalui PKH	Lembaga	1	1	100%
3.	Meningkatnya pemahaman masyarakat dan dunia usaha terhadap PMKS dan PSKS	orang	300	300	100%
4.	Meningkatnya Jejaring kerjasama dengan pelaku usaha kesejahteraan sosial / Desa Pakraman	Desa Pakraman	3	3	100%

- b. *Misi 2 : Melaksanakan deteksi dini dan pencegahan terhadap munculnya kerawanan sosial;*

Sasaran yang hendak dicapai dari misi tersebut :

- 1). Diketuinya atau terdeteksinya secara dini terhadap munculnya kerawanan sosial
 2). Dapat dicegahnya terhadap munculnya kerawanan sosial

Indikator Kinerja untuk Misi 2:

No	Indikator Kinerja/Sasaran	Satuan	Tahun 2014		Capaian Kinerja Tahun 2014 (%)
			Target	Realisasi	
1.	Meningkatnya pemahaman PMKS tentang bahaya Narkoba	Orang	1000	1000	100%
2	Meningkatnya Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi perempuan dan anak .	Orang	225	225	100%

c. Misi 3 : Meningkatkan Pemetaan Kerawanan Sosial diseluruh wilayah Kabupaten Buleleng

Sasaran yang hendak dicapai dari misi tersebut :

- 1). Teridentifikasinya dan terinventarisasinya kerawanan sosial diseluruh wilayah Kabupaten Buleleng
- 2). Terpetakannya lokasi dan jenis kerawanan sosial diseluruh wilayah Kabupaten Buleleng .

Indikator Kinerja untuk Misi 3

No	Indikator Kinerja/Sasaran	Satuan	Tahun 2014		Capaian Kinerja Tahun 2014 (%)
			Target	Realisasi	
1.	Meningkatnya kemampuan Petugas dan Pendamping Sosial terhadap PMKS yang ada di wilayahnya	orang	165	165	100 %
2.	Meningkatnya kewaspadaan terhadap masalah strategis Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	orang	413	408	98,7 %
3.	Meningkatnya Operasional Panti Asuhan	Lembaga	18	18	100%

d. *Misi 4 : Peningkatan aksesibilitas , pemberdayaan dan bantuan bagi penyandang masalah sosial, karang taruna dan pekerja sosial .*

Sasaran yang hendak dicapai dari misi tersebut ;

- 1). Meningkatnya aksesibilitas dan pemberdayaan bagi penyandang masalah sosial .
- 2). Meningkatnya aksesibilitas dan pemberdayaan bagi karang taruna dan pekerja sosial

Indikator Kinerja untuk Misi 4 :

No	Indikator Kinerja/Sasaran	Satuan	Tahun 2014		Persentase Capaian Kinerja Tahun 2014 (%)
			Target	Realisasi	
1.	Meningkatnya bantuan Rumah Tidak Layak Huni bagi keluarga Miskin	KK	78	78	100%
2.	Meningkatnya harapan hidup Lanjut Usia	Orang	560	560	100%
3.	Meningkatnya keterampilan Anak terlantar	Anak	210	210	100%
4.	Meningkatnya keterampilan Penyandang cacat	orang	15	15	100%
5.	Meningkatnya peran dan dayaguna penyandang cacat	orang	138	138	100%
6.	Meningkatnya SDM Karang Taruna dan Pekerja Sosial Masyarakat	Organisasi	9	9	100%
		PSM	9	9	
7.	Meningkatnya keterampilan berusaha bagi Anak Nakal	Orang	10	10	100 %

e. *Misi 5. Meningkatkan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Kejuangan*

Sasaran yang hendak dicapai dari misi tersebut :

- 1). Meningkatnya pelestarian nilai-nilai kepahlawanan/kejuangan

Indikator Kinerja untuk Misi 5:

No	Indikator Kinerja/Sasaran	Satuan	Tahun 2014		Capaian Kinerja Tahun 2014 (%)
			Target	Realisasi	
1.	Meningkatnya pemahaman kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	Orang dan kali	400 dan 4 kali	400 dan 4 kali	100%
2	Meningkatnya fungsi TMP Qurastana dan Monumen /Tugu Perjuangan	Monumen	4	4	100%

Berdasarkan Tabel / Matriks Pengukuran Kinerja diatas , maka dapat diketahui bahwa tingkat pencapaian target pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat disebutkan bahwa sasaran target tersebut telah *dapat tercapai dengan amat baik* . Namun pada kegiatan pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial (dalam penanganan masalah gelandangan dan pengemis) dari target yang ditetapkan sebanyak 60 orang terealisasi sebanyak 50 orang atau 83,3 % , hal ini menunjukkan bahwa permasalahan sosial yang menyangkut masalah gelandangan dan pengemis sudah berkurang di Kabupaten Buleleng, dapat dikatakan bahwa pembinaan yang dilaksanakan setiap tahun sudah berhasil .

Demikian pula penanganan kepada orang terlantar dengan target sebanyak 5 orang terealisasi 3 orang dan evakuasi / penguburan mayat terlantar dengan target 6 orang terealisasi 3 orang artinya orang terlantar dan mayat terlantar yang menjadi kasus di Kabupaten Buleleng telah tertangani 100 % , ini menandakan bahwa perhatian keluarga dan masyarakat terhadap kepedulian sosial sudah semakin meningkat .

B. EVALUASI KINERJA

Dari pelaksanaan pengukuran kinerja tersebut diatas dapat dilaksanakan evaluasi kinerja berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

Evaluasi Pengukuran Kinerja
Sebagai perbandingan pencapaian target sasaran tahun 2013 dan 2014

No	Indikator Kinerja/Sasaran	Satuan	Tahun 2013		Tahun 2014		Capaian Kinerja Tahun 2014 (%)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1.	Meningkatnya keberdayaan eks penyandang penyakit social (gepeng , PSK dll)	Orang/gepeng	100	50	60	50	83,3%
		Orang/Eks Napi	10	10	10	10	100 %
2.	Meningkatnya perlindungan kesosialan khususnya kemiskinan melalui PKH	Lembaga	1	1	1	1	100%
3.	Meningkatnya pemahaman masyarakat dan dunia usaha terhadap PMKS dan PSKS	Orang	270	270	300	300	100%
4.	Meningkatnya Jejaring kerjasama dengan pelaku usaha kesejahteraan sosial / Desa Pakraman	Desa Pakraman	4	4	3	3	100%
5.	Meningkatnya pemahaman PMKS tentang bahaya Narkoba	orang	1000	1000	1000	1000	100%
6.	Meningkatnya Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi perempuan dan anak .	orang	175	175	225	225	100%
7.	Meningkatnya kemampuan Petugas dan Pendamping Sosial terhadap PMKS yang ada di wilayahnya	orang	-	-	165	165	100%
8.	Meningkatnya kewaspadaan terhadap masalah strategis Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	orang	315	315	413	408	98,7 %

9.	Meningkatnya Operasional Panti Asuhan	Lembaga	19	19	18	18	100%
10.	Meningkatnya bantuan Rumah Tidak Layak Huni bagi keluarga Miskin	KK	48	48	78	78	100%
11.	Meningkatnya harapan hidup Lanjut Usia	orang	160	160	560	560	100 %
12.	Meningkatnya keterampilan Anak terlantar	Anak	220	220	210	210	100%
13.	Meningkatnya keterampilan Penyandang cacat	orang	10	10	15	15	100%
14.	Meningkatnya peran dan dayaguna penyandang cacat	orang	151	151	138	138	100 %
15.	Meningkatnya SDM Karang Taruna dan Pekerja Sosial Masyarakat	Organisasi PSM	9 9	9 9	9 9	9 9	100% 100%
16.	Meningkatnya keterampilan berusaha bagi Anak Nakal	Orang	10	10	10	10	100 %
17.	Meningkatnya pemahaman kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	Orang	400	400	404	404	100%
18.	Meningkatnya fungsi TMP Qurastana dan Monumen /Tugu Perjuangan	Monumen	4	4	4	4	100%

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya jumlah target sasaran cukup bervariasi yaitu ada yang targetnya naik dan ada pula yang turun ini tergantung dari jumlah usulan dan kemampuan anggaran yang ada .

ASPEK KEUANGAN

Keberhasilan penyelenggaraan urusan sosial diukur melalui pencapaian keuangan pada masing-masing indikator kinerja.

Secara umum realisasi capaian kinerja dalam tahun 2014 telah mencapai target yang telah ditetapkan. Capaian rata-rata tahun 2014 mencapai target yang direncanakan dan bila dibandingkan dengan capaian tahun 2013 memiliki angka pencapaian target yang lebih tinggi.

Pencapaian kinerja tersebut didukung melalui pelaksanaan 8 Program dan 20 kegiatan yang menjadi program utama dan 4 program serta 23 kegiatan yang menjadi program penunjang dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 5.924.209.000 ,- dengan realisasi 5.839.730.695.- atau 98,57 %. Secara rinci

alokasi anggaran dan realisasi per kegiatan tergambar pada realisasi belanja langsung. Pencapaian target program kegiatan sudah tercapai secara fisik 99,47 %, sekalipun realisasi dana mencapai 98,57 %, hal ini disebabkan karena adanya efisiensi dalam pelaksanaan Belanja. Realisasi keuangan dari beberapa program dan kegiatan sebagaimana dalam table berikut :

Realisasi Keuangan

No	Belanja	Jumlah Anggaran tahun 2014	Realisasi tahun 2014	Selisih Lebih/kurang	%
1.	Belanja Tidak langsung	2.626.064.530,08	2.596.940.716,00	29.123.814,08	98,89 %
2.	Belanja Langsung	5.924.209.000,00	5.839.730.695,00	84.478.305,00	98,57 %
	a. Belanja Pegawai	235.320.000,00	214.290.000,00	21.030.000,00	91,06 %
	b. Belanja Barang & Jasa	4.293.083.000,00	4.238.917.875,00	54.165.125,00	98,73 %
	c. Belanja Modal	1.395.806.000,00	1.386.522.820,00	9.283.180,00	99,33 %
	Total	8.550.273.530,08	8.436.671.411,00	113.602.119,08	98,67 %

Uraian capaian pada masing-masing sasaran kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan jasa surat menyurat:
 - Pendanaan terlaksana : 100 %
 - Tingkat pencapaian kepada sasaran : 100 %
2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik :
 - Pendanaan terlaksana : 97,86 %
 - Tingkat Pencapaian kepada Sasaran : 100 %
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Pendanaan terlaksana : 98,81 %
 - Tingkat Pencapaian kepada Sasaran : 100 %
4. Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional :
 - Pendanaan terlaksana : 81,00 %
 - Tingkat Pencapaian kepada Sasaran : 100 %

5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan :
 - Pendanaan terlaksana : 88,00 %
 - Tingkat Pencapaian kepada Sasaran : 100 %
6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor :
 - Pendanaan terlaksana : 100 %
 - Tingkat Pencapaian kepada Sasaran : 100 %
7. Penyediaan Alat Tulis Kantor :
 - Pendanaan terlaksana : 99,98 %
 - Tingkat Pencapaian kepada sasaran : 100 %
8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan :
 - Pendanaan Terlaksana : 100 %
 - Tingkat Pencapaian kepada sasaran : 100 %
9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Pendanaan Terlaksana : 92,35 %
 - Tingkat Pencapaian kepada sasaran : 100 %
10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor :
 - Pendanaan Terlaksana : 98,87 %
 - Tingkat Pencapaian kepada sasaran : 100 %
11. Penyediaan bahan bacaan dan Perundang-undangan :
 - Pendanaan Terlaksana : 100 %
 - Tingkat Pencapaian kepada sasaran : 100 %
12. Penyediaan Makanan dan Minuman :
 - Pendanaan Terlaksana : 100 %
 - Tingkat Pencapaian kepada sasaran : 100 %
13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah :
 - Pendanaan Terlaksana : 100 %
 - Tingkat Pencapaian kepada sasaran : 100 %
14. Pembangunan Gedung Kantor:
 - Pendanaan Terlaksana : 98,26 %
 - Tingkat Pencapaian kepada sasaran : 100 %
15. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional:
 - Pendanaan Terlaksana : 100 %
 - Tingkat Pencapaian kepada sasaran : 100 %
16. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - Pendanaan Terlaksana : 99,99 %
 - Tingkat Pencapaian kepada sasaran : 100 %
17. Penyelenggaraan dan pengadaan sarana/prasarana upacara :

- Pendanaan Terlaksana : 99,93 %
 - Tingkat Pencapaian kepada sasaran : 100 %
18. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- Pendanaan Terlaksana : 99,66 %
 - Tingkat Pencapaian kepada sasaran : 100 %
19. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional :
- Pendanaan Terlaksana : 98,91 %
 - Tingkat Pencapaian kepada sasaran : 100 %
20. Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan Gedung Kantor :
- Pendanaan Terlaksana : 99,51 %
 - Tingkat Pencapaian kepada sasaran : 100 %
21. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor :
- Pendanaan terlaksana : 99,19 %
 - Tingkat Pencapaian kepada sasaran : 100 %
22. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
- Pendanaan terlaksana : 91,34 %
 - Tingkat Pencapaian kepada sasaran : 100 %
23. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD :
- Pendanaan Terlaksana : 99,75 %
 - Tingkat Pencapaian kepada sasaran : 100 %
24. Peningkatan Kemampuan (capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya :
- Pendanaan Terlaksana : 99,74 %
 - Tingkat Pencapaian kepada sasaran : 100 %
25. Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin :
- Pendanaan Terlaksana : 99,20 %
 - Tingkat Pencapaian kepada sasaran : 100 %
26. Pelayanan dan Perlindungan Sosial, hukum bagi korban eksploitasi perdagangan perempuan dan anak :
- Pendanaan Terlaksana : 99,18 %
 - Tingkat Pencapaian kepada sasaran : 100 %
27. Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye sosial bagi PMKS :
- Pendanaan Terlaksana : 99,70 %
 - Tingkat Pencapaian kepada sasaran : 100 %
28. Pelatihan Keterampilan Praktek belajar kerja bagi Anak Terlantar Termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat, Anak Nakal :
- Pendanaan Terlaksana : 99,50 %

- Tingkat Pencapaian kepada sasaran : 100 %
29. Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa :
 - Pendanaan Terlaksana : 95,63 %
 - Tingkat Pencapaian kepada sasaran : 98,78 %
 30. Pembinaan dan Bimbingan Motivasi kepada Lanjut Usia Luar Panti :
 - Pendanaan Terlaksana : 99,68 %
 - Tingkat Pencapaian kepada sasaran : 100 %
 31. Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar:
 - Pendanaan Terlaksana : 99,61 %
 - Tingkat Pencapaian kepada sasaran : 100 %
 32. Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang cacat dan Eks trauma :
 - Pendanaan Terlaksana : 98,50 %
 - Tingkat Pencapaian kepada sasaran : 100 %
 33. Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma :
 - Pendanaan Terlaksana : 97,70 %
 - Tingkat Pencapaian kepada sasaran : 100 %
 34. Operasi dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Panti Asuhan/Jompo :
 - Pendanaan Terlaksana : 98,17 %
 - Tingkat Pencapaian kepada sasaran : 100 %
 35. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial :
 - Pendanaan Terlaksana : 98,90 %
 - Tingkat Pencapaian kepada sasaran : 100 %
 36. Pemberdayaan eks Penyandang Penyakit Sosial :
 - Pendanaan Terlaksana : 91,92 %
 - Tingkat Pencapaian kepada sasaran : 83,30 %
 37. Peningkatan Peran aktif masyarakat dan dunia usaha :
 - Pendanaan terlaksana : 99,81 %
 - Tingkat Pencapaian kepada sasaran : 100 %
 38. Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha esejahτεραan sosial masyarakat :
 - Pendanaan terlaksana : 99,30 %
 - Tingkat Pencapaian kepada sasaran : 100 %
 39. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat (Karang Taruna dan PSM):
 - Pendanaan terlaksana : 98,09 %
 - Tingkat capaian kepada sasaran : 100 %

40. Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial :
- Pendanaan Terlaksana : 99,49 %
 - Tingkat Pencapaian kepada sasaran : 100 %
41. Penanaman Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial :
- Pendanaan Terlaksana : 99,36 %
 - Tingkat Pencapaian kepada sasaran : 100 %
42. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) dan Monumen/Tugu perjuangan :
- Pendanaan Terlaksana : 99,84 %
 - Tingkat Pencapaian kepada sasaran : 100 %
43. Pemeliharaan Monumen Tri Yudha Sakti :
- Pendanaan terlaksana : 99,89 %
 - Tingkat capaian kepada sasaran : 100 %

C. ANALISIS KINERJA

Total Capaian Kinerja tahun 2014 telah mencapai 96,63 %.

Keberhasilan :

Pada dasarnya kegiatan yang telah ditetapkan sebanyak 43 jenis kegiatan dari 12 (dua belas) program. Dari ke 12 program tersebut, 8 (delapan) Program dan 20 kegiatan menjadi program utama dan 4 program serta 23 kegiatan menjadi program penunjang yang menjadi pendukung kegiatan . Pada umumnya Program dan kegiatan telah dapat dilaksanakan secara optimal atau berhasil dengan baik. Ini terbukti dari perhitungan Pengukuran Kinerja Kegiatan dapat dilihat bahwa ada 2 kegiatan tingkat capaian pendanaannya mencapai 81 % – 88 % dan 41 kegiatan telah tercapai antara 91 % – 99 %, namun secara fisik pada program utama tingkat capaian keluaran rata-rata telah mencapai 100 % . Begitu juga terhadap Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) tingkat capaiannya rata-rata antara 81 % – 100 % (realisasi keuangan) dan rata- rata capaian fisik 100 % .

Kegagalan :

Dalam rangka pencapaian kegiatan dan sasaran tidak terdapat hambatan yang menjadi kegagalan secara prinsip, namun kendala yang dihadapi berupa :

- Belum adanya Rumah Singgah / Shelter yang digunakan untuk menampung Korban Bencana, Gepeng, Korban Eksploitasi Sosial lainnya yang membutuhkan pengamanan dan perlindungan sosial .
- Penjaringan terhadap gelandangan, pengemis dan wanita tuna susila, tempat mangkalnya berpindah pindah sehingga sulit dalam mengadakan razia ;
- Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keahlian dibidang Informasi Tehnologi dan dibidang Keuangan (Akuntansi) ;

BAB IV

P E N U T U P

A. TINJAUAN UMUM

Dari capaian kinerja dalam kegiatan program dan kebijaksanaan pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dapat dikatakan berhasil, hal ini bisa dibuktikan dengan pencapaian target kegiatan dan target sasaran sebesar 98,57 % (Belanja Langsung). Pelaksanaan program ini tercapai tentunya berkat dukungan dan koordinasi dari Dinas/Instansi terkait, partisipasi aktif dari masyarakat, para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) , Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) , Tenaga Pendamping Asistensi Sosial Penyandang Cacat, Lanjut Usia, Anak Terlantar , Pendamping KUBE , Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) , serta Pendamping dan Operator Program Keluarga Harapan (PKH) yang ada di masing-masing Kecamatan .

B. TINJAUAN KHUSUS

Dilihat keberhasilan secara umum dalam tahun 2014 capaian kinerja program Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dapat dikatakan telah sesuai dengan rencana kerja yang dibuat namun secara umum jumlah sasaran yang direncanakan masih belum tercapai sesuai dengan jumlah /populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada dan secara khusus capaian kinerja ini diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam pelaksanaan program-program berikutnya, terutama menyangkut tentang pola penanganan, tenaga pelaksana/anggaran/biaya yang dibutuhkan, yang tentunya akan tetap mengacu kepada kebijaksanaan yang diambil oleh pimpinan pemerintah Kabupaten Buleleng, sehingga koordinasi kerja tetap berjalan dengan baik melalui motto cepat tanggap, cepat temu, cepat tindak dan cepat tuntas terhadap penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial.

C. KENDALA / MASALAH YANG DIHADAPI.

Sebagaimana telah diuraikan dalam BAB III (Akuntabilitas Kinerja), bahwa secara prinsip tidak menghadapi kendala / masalah.

Adapun kendala yang dihadapi antara lain :

1. Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sangat diperlukan adanya data dukung (data base) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang *valid* pada masing-masing Desa/kelurahan yang akan menjadi sasaran garapan program dan kegiatan .
2. Latar belakang pendidikan PMKS relatif rendah , khususnya bagi para penyandang cacat dan keluarga Fakir Miskin sehingga pemahaman bimbingan sosial dan keterampilan yang diberikan belum bisa mencapai 90 % atau belum sesuai dengan harapan dan pada umumnya para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) banyak yang belum memiliki skill / kemampuan dibidang keterampilannya sehingga masih diperlukan pembinaan lanjutan baik secara manajemen maupun teknis.
3. Pemberian sembako kepada para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ditujukan dalam rangka pemberian perlindungan sosial (Social Protection) , namun sering kali kesan dimasyarakat ini sebagai kegiatan yang tidak membantu. Kenyataannya para penerima bantuan sangat merasa dibantu atas bantuan sembako tersebut dalam rangka perbaikan gizi para penyandang masalah kesejahteraan sosial .

D. RENCANA PEMECAHAN MASALAH.

Berdasarkan kendala tersebut diatas, rencana pemecahan yang dapat dilakukan kedepan antara lain :

1. Menyiapkan data PMKS secara lengkap dengan melakukan pendataan.
2. Menjaring PMKS yang berpendidikan rendah untuk diprogram ketingkat yang lebih tinggi (wajib belajar 12 tahun) dan bekerja sama dengan instansi terkait didalam pembinaan keterampilan bagi PMKS baik secara manajemen maupun

tehnis usaha dalam peningkatan skill keterampilan serta diprogramkan dalam Program Keluarga Harapan (PKH) .

3. Mengupayakan penanganan PMKS secara berkesinambungan dan berkelanjutan sesuai dengan permasalahan sosial yang dihadapi dan mengupayakan pembinaan lebih intensip secara manajemen dan tehnis dalam pengelolaan dibidang Usaha Ekonomi Produktif (UEP) baik dalam pengembangan bantuan melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) maupun bantuan secara individu/perorangan .
4. Memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada para PMKS dan masyarakat pada khususnya sehingga memiliki pemahaman tentang fungsi program dan bantuan sosial yang diberikan kepada para PMKS .

E. SARAN TINDAK LANJUT

Guna lebih meningkatkan pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial diharapkan adanya alokasi anggaran untuk menangani masalah sosial melalui suatu sistim yaitu adanya ketentuan prosentasi dari jumlah PAD yang ada di Kabupaten Buleleng, sehingga perencanaan dapat dibuat secara faktual sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Demikian laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya serta untuk penyempurnaan pelaksanaan kegiatan tahun-tahun berikutnya .

	2. Penyediaan jasa	97,86	100,00	100,00	EFISIE N	EFEKTIF	1. Input (Masukan)					
	komunikasi sumber daya air dan listrik						Dana Yang tersedia	Rp	107.069.000	104.777.316	97,86	
							2. Output(Keluaran)					
							Jumlah Rekening Telepon, Air, dan Listrik	rekening	96	96	100,00	
							3. Outcome (Hasil)					
							Meningkatnya operasional kantor	rekening	96	96	100,00	
							4. Benefit :					
							Kebutuhan Air, Telepon dan Listrik dapat dimanfaatkan	rekening	96	96	100,00	
							5. Impact :					
							Kelancaran tugas-tugas dinas dapat berjalan dengan baik	rekening	96	96	100,00	

							2. Output(Keluaran)					
							Jumlah jenis laporan keuangan	bulan	12	12	100,00	
							3. Outcome (Hasil)					
							Tersedianya Data Bahan Kajian keuangan	bulan	12	12	100,00	
							4. Benefit :					
							Terpenuhinya jasa administrasi keuangan	Bulan	12	12	100,00	
							5. Impack :					
							Tugas-tugas administrasi dapat diselesaikan	Bulan	12	12	100,00	
	5. Penyediaan jasa	81,00	100,00	100,00	EFISIE N	EFEKTIF	1. Input (Masukan)					
	Pemeliharaan dan Perizinan						Dana Yang tersedia	Rp	25.500.000	20.655.500	81,00	

	Kendaraan											
	Dinas / Operasional						2. Output(Keluara n)					
							Jumlah jenis kendaraan dinas disamsat	kali	31	31	100,00	
							3. Outcome (Hasil)					
							Meningkatnya operasional kedinasan	kali	31	31	100,00	
	6. Penyediaan jasa	100,00	100,00	100,00	EFISIE N	EFEKTIF	1. Input (Masukan)					
	Kebersihan Kantor						Dana Yang tersedia, tenaga kerja 4 orang	Rp	44.058.000	44.058.000	100,00	
							2. Output(Keluara n)					
							Terlaksananya kebersihan kantor	bulan	12	12	100,00	
							3. Outcome (Hasil)					
							Terpeliharanya lingkungan	bulan	12	12	100,00	

							kantor					
							4. Benefit : Kantor terpelihara dengan baik	bulan	12	12	100,00	
							5. Impack : Kebersihan, kenyamanan kantor tetap terjaga.	bulan	12	12	100,00	
	7. Penyediaan	99,98	100,00	100,00	EFISIE N	EFEKTIF	1. Input (Masukan)					
	Alat Tulis Kantor						Dana Yang tersedia	Rp	24.133.000	24.128.300	99,98	
							2. Output(Keluaran)					
							Terlaksananya penyediaan ATK	Bulan	12	12	100,00	
							3. Outcome (Hasil)					
							Tersedianya alat-alat tulis kantor	Bulan	12	12	100,00	

							4. Benefit :	Bulan	12	12	100,00	
							Terpenuhinya ATK					
							5. Impack :	Bulan	12	12	100,00	
							Tugas-tugas kantor lancar					
	8. Penyediaan Barang	100,00	100,00	100,00	EFISIE N	EFEKTIF	1. Input (Masukan)					
	Cetakan dan						Dana Yang tersedia	Rp	4.500.000	4.500.000	100,00	
	Penggandaan											
							2. Output(Keluaran)					
							Jumlah lembar barang cetakan dan penggandaan disediakan	lembar	30.000	30.000	100,00	
							3. Outcome (Hasil)					
							Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	bulan	12	12	100,00	
							4. Benefit :					

							Tersedianya barang cetakan dan peng-	bulan	12	12	100,00	
							gandaan					
							5. Impack : Kegiatan administrasi untuk percetakan dan pernggandaan lancar	bulan	12	12	100,00	
	9. Penyediaan Komponen	100,00	100,00	100,00	EFISIE N	EFEKTIF	1. Input (Masukan)					
	Instalasi Listrik/						Dana Yang tersedia	Rp	46.733.000	43.158.620	92,35	
	Penerangan											
	Bangunan Kantor						2. Output(Keluaran)					
							Jumlah komponen listrik disediakan	Bulan	12	12	100,00	
							3. Outcome (Hasil)					
							Tersedianya komponen listrik / penerangan	Bulan	12	12	100,00	

							bangunan kantor yang memadai					
							4. Impact : Kegiatan kantor dapat berjalan lancar	Bulan	12	12	100,00	
	10. Penyediaan	100,00	100,00	100,00	EFISIE N	EFEKTIF	1. Input (Masukan)					
	Peralatan dan						Dana Yang tersedia	Rp	171.645.600,00	169.705.700,00	98,87	
	Perlengkapan											
	Kantor						2. Output(Keluaran)					
							Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor disediakan	Jenis	7	7	100,00	
							3. Outcome (Hasil)					
							Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis	7	7	100,00	

							4. Impack :					
	11. Penyediaan bahan	100,00	100,00	100,00	EFISIE N	EFEKTIF	1. Input (Masukan)					
	bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						Dana Yang tersedia	Rp	6.000.000	6.000.000	100,00	
							2. Output(Keluaran)					
							Jumlah jenis bahan bacaan dan perundang-undangan disediakan	Exempl ar	1800	1800	100,00	
							3. Outcome (Hasil)					
							Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	Exempl ar	1800	1800	100,00	
							4. Benefit :					
							Terpenuhinya penyediaan bahan bacaan	Exempl ar	1800	1800	100,00	
							5. Impack :					

							(Hasil)					
							Meningkatnya kinerja pegawai	Bulan	12	12	100,00	
							4. Benefit :					
							Meningkatnya semangat kerja Pegawai	Bulan	12	12	100,00	
							5. Impack :					
							Lancarnya pelaksanaan tugas kantor	Bulan	12	12	100,00	
	13.Rapat-rapat	99,96	100,00	100,00	EFISIE N	EFEKTIF	1. Input (Masukan)					
	Koordinasi dan konsultasi ke						Dana Yang tersedia	Rp	305.214.900	305.091.560	99,96	
	Luar Daerah/						2. Output(Keluaran)					
	Dalam Daerah						Jumlah kali koordinasi dilaksanakan	Tahun	1	1	100,00	
							3. Outcome (Hasil)					
							Tercapainya Koordinasi	Tahun	1	1	100,00	

	15. Pengadaan	100,00	100,00	100,00	EFISIE N	EFEKTIF	1. Input (Masukan)					
	Kendaraan Dinas/						Dana Yang tersedia	Rp	29.200.000	29.200.000	100,00	
	Operasiona I											
							2. Output(Keluaran)					
							Jumlah jenis kendaraan dinas operasional diadakan	Unit	2	2	100,00	
							3. Outcome (Hasil)					
							Terwujudnya sarana prasarana aparatur	Unit	2	2	100,00	
	16. Pengadaan	99,66	100,00	100,00	EFISIE N	EFEKTIF	1. Input (Masukan)					
	Perlengkap an						Dana Yang tersedia	Rp	3.000.000	2.989.800	99,66	
	gedung kantor											
							2. Output(Keluaran)					

							Jumlah jenis perlengkapan kantor diadakan	Paket	1	1	100,00	
							3. Outcome (Hasil)					
							Tersedianya tempat kerja yang nyaman	Paket	1	1	100,00	
	17. Penyelenggaraan	99,93	100,00	100,00	EFISIE N	EFEKTIF	1. Input (Masukan)					
	dan pengadaan sarana /						Dana Yang tersedia, Tenaga Kerja	Rp	86.300.000	86.241.000	99,93	
	prasarana						2. Output (Keluaran)					
	upacara						Jumlah kali upacara/sarana diadakan	kali	424	424	100,00	
							3. Outcome (Hasil)					
							Meningkatnya Iman Pegawai	kali	424	424	100,00	
	18. Pemeliharaan	99,66	100,00	100,00	EFISIE N	EFEKTIF	1. Input (Masukan)					

	n Rutin /											
	Berkala Gedung Kantor						Dana Yang tersedia	Rp	3.000.000	2.989.80 0	99,66	
							2. Output(Keluara n)					
							Jumlah luas taman dipelihara	Paket	1	1	100,00	
							3. Outcome (Hasil)					
							Tersedianya tempat kerja yang nyaman	Paket	1	1	100,00	
	19. Pemeliharaa n	98,91	100,00	100,00	EFISIE N	EFEKTIF	1. Input (Masukan)					
	Rutin Berkala						Dana yang tersedia, tenaga kerja 3 orang	Rp	63.900.000	63.204.7 50	98,91	
	Kendaraan Dinas/ Operasiona l						2. Output(Keluara n)					
							Jumlah jenis kendaraan	unit	5	5	100,00	

							dinas dipelihara					
							3. Outcome (Hasil)					
							Tersedianya kendaraan dinas / operasional yang layak	unit	5	5	100,00	
	20. Pemeliharaan	99,51	100,00	100,00	EFISIE N	EFEKTIF	1. Input (Masukan)					
	Rutin / Berkala						Dana Yang tersedia	Rp	16.450.000	16.370.000	99,51	
	Peralatan											
	Gedung Kantor						2. Output(Keluaran)					
							Jumlah unit peralatan gedung kantor dipelihara	Unit	23	23	100,00	
							3. Outcome (Hasil)					
							Meningkatnya operasional peralatan gedung kantor	Unit	23	23	100,00	
	21. Rehabilitasi	99,19	100,00	100,00	EFISIE N	EFEKTIF	1. Input (Masukan)					

	Sedang/											
	Berat Rumah						Dana Yang tersedia	Rp	200.000.000	198.375.000	99,19	
	Gedung Kantor											
							2. Output(Keluaran)					
							Jumlah, luas gedung kantor direhab	Unit	2	2	100,00	
							3. Outcome (Hasil)					
							Meningkatnya operasional gedung kantor	Unit	2	2	100,00	
Program	22. Pengadaan	91,34	95,00	95,00	EFISIE N	EFEKTIF	1. Input (Masukan)					
Peningkatan Disiplin Aparatur	Pakaian Khusus Hari-Hari						Dana Yang tersedia	Rp	38.000.000	34.708.300	91,34	
	Tertentu						2. Output(Keluaran)					
							Jumlah jenis pakaian diadakan peralatan gedung kantor	Stel	140	133	95,00	

							3. Outcome (Hasil)					
							Meningkatnya disiplin pegawai	Stel	140	133	95,00	
Program	23. Penyusunan	99,75	100,00	100,00	EFISIEN	EFEKTIF	1. Input (Masukan)					
Peningkatan	Laporan Capaian						Dana Yang tersedia, Tenaga Kerja 3 Orang	Rp	114.834.000	114.552.500	99,75	
Pengembangan	Kinerja dan											
Sistem Pelaporan	Ikhtisar Realisasi						2. Output(Keluaran)					
Capaian Kinerja dan Keuangan.	Kinerja SKPD						Jumlah buku laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD disusun	Laporan	12	12	100,00	
							3. Outcome (Hasil)					
							Meningkatnya pengendalian kegiatan	Laporan	12	12	100,00	

Program	24. Peningkatan kemampuan	99,74	100,00	100,00	EFISIE N	EFEKTIF	1. Input (Masukan)					
Pemberdayaan	(Capacity Building)						Dana yang tersedia, tenaga kerja	Rp.	78.107.000	77.902.400	99,74	
fakir miskin	petugas dan pendamping											
komunitas adat	sosial pemberdayaan											
terpencil (KAT)	FM, KAT dan PMKS						2. Output(Keluaran)					
dan Penyandang Masalah	lainnya						Jumlah petugas dan pendamping sosial yang dibina	Orang	165	165	100,00	
Kesejahteraan							3. Outcome (Hasil)					
Sosial (PMKS)							Meningkatnya kemampuan petugas dan pendamping sosial	Orang	165	165	100,00	
Lainnya							4. Benefit :					
							Meningkatnya kemampuan	Orang	165	165	100,00	

							petugas dan pendamping sosial					
	25. Pengadaan sarana	99,19	100,00	100,00	EFISIE N	EFEKTIF	1. Input (Masukan)					
	dan prasarana						Dana Yang tersedia, tenaga kerja 4 orang	Rp.	1.033.367.000	1.025.012.900	99,19	
	pendukung usaha											
	bagi keluarga											
	miskin						2. Output(Keluaran)					
							Jumlah Keluarga Miskin yang menerima bantuan rehab rumah berupa bahan bangunan rumah (BBR)	Orang	78	78	100,00	
							3. Outcome (Hasil)					
							Meningkatnya Sarana / prasarana perumahan bagi Keluarga Miskin	Orang	78	78	100,00	

							4. Benefit :					
							Terpenuhinya capaian pemberdayaan Fakir Miskin, Komoditas adat terpencil (KAT)	Orang	78	78	100,00	
Program	26. Pelayanan dan	99,18	100,00	100,00	EFISIE N	EFEKTIF	1. Input (Masukan)					
Pelayanan dan	perlindungan sosial,						Dana yang tersedia, tenaga kerja 1 orang	Rp.	35.000.000	34.713.850	99,18	
Rehabilitasi	hukum bagi korban											
Kesejahteraan	eksploitasi perdagangan											
Sosial	perempuan dan anak.						2. Output(Keluaran)					
							Jumlah perempuan dan anak yang mendapat pelayanan pemberdayaan berupa sosialisasi dan jasa konselor	orang	225	225	100,00	
							3. Outcome					

							(Hasil)					
							Meningkatnya pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi perempuan dan anak .	orang	225	225	100,00	
	27. Pelaksanaan KIE	99,75	100,00	100,00	EFISIE N	EFEKTIF	1. Input (Masukan)					
	Konseling dan kampanye sosial bagi penyandang masalah						Dana yang dibutuhkan, narasumber	Rp.	34.750.000	34.662.900	99,75	
	kesejahteraan sosial (PMKS)						2. Output(Keluaran)					
							Jumlah PMKS yang mengikuti KIE Konseling .	orang	1.000	1.000	100,00	
							3. Outcome (Hasil)					
							Meningkatnya Pemahaman Penyandang Masalah Kesejahteraan	%	80	80	100,00	

							Sosial (PMKS) mengenai bahaya narkoba					
							4. Benefit:					
							Peserta Akan lebih memahami bahaya Narkoba/Napza	orang	1.000	1.000	100,00	
	28. Pelatihan Keterampilan	99,55	100,00	100,00	EFISIE N	EFEKTIF	1. Input (Masukan)					
	dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar Termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat, Anak Nakal						Dana yang tersedia, Narasumber, Tenaga kerja	Rp.	56.950.000	56.695.650	99,55	
							2. Output(Keluaran)					
							Jumlah anak terlantar, anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal yang mengikuti pelatihan kerajinan perak	Orang	10	10	100,00	
							3. Outcome					

							(Hasil)					
							Meningkatnya keterampilan anak terlantar, anak jalanan, anak cacat dan anak nakal	Orang	10	10	100,00	
							4. Benefit (Manfaat):					
							Meningkatnya kesejahteraan dan kemandirian anak terlantar, anak jalanan, anak cacat, anak nakal	Orang	10	10	100,00	
	29. Penanganan masalah-	95,63	77,50	100,00	EFISIE N	EFEKTIF	1. Input (Masukan)					
	masalah strategis yang						Dana yang dibutuhkan, barang buffer stock	Rp.	155.790.000	148.980.550	95,63	
	menyangkut tanggap											
	cepat darurat dan											
	kejadian						2.					

	luar biasa.						Output(Keluara n)					
							Jumlah masalah strategi yang ditangani :					
							- Buffer stock (beras dan bahan makanan lainnya)	KK	400	400	100,00	
							- Pemulangan orang terlantar	orang	5	3	60,00	
							- Evakuasi dan Penguburan Mayat Terlantar	orang	6	3	50,00	
							- Koordinasi bencana ke Kementerian RI	Orang	2	2	100,00	
							3. Outcome (Hasil)					
							Meningkatnya kewaspadaan terhadap masalah strategis Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa .	KK	400	400	100,00	
	30. Pembinaan	99,68	100,00	100,00	EFISIE N	EFEKTIF	1. Input (Masukan)					

							4. Benefit :					
Program	32. Pendidikan dan Pelatihan	98,50	100,00	100,00	EFISIE N	EFEKTIF	1. Input (Masukan)					
Pembinaan para penyandang cacat dan trauma	bagi Penyandang cacat dan Eks Trauma						Dana yang dibutuhkan, bahan material, sasaran 15 orang	Rp.	42.262.000	41.629.000	98,50	
							2. Output(Keluaran)					
							Jumlah penyandang cacat (Paca) dan Eks trauma yang mendapatkan daya guna 15 orang mendapatkan Bimbingan UEP Ternak Babi	orang	15	15	100,00	
							3. Outcome (Hasil)					
							Meningkatnya kemandirian bagi penyandang	Orang	15	15	100,00	

							cacat dan eks trauma					
							4. Benefit (Manfaat) :					
							Meningkatnya kesejahteraan penyandang cacat dan eks trauma	orang	15	15	100,00	
	33. Pendayagunaan Para	97,70	100,00	100,00	EFISIE N	EFEKTIF	1. Input (Masukan)					
	Penyandang cacat dan eks trauma						Dana Yang tersedia, tenaga kerja 2 orang	Rp.	136.110.000	132.981.200	97,70	
							2. Output(Keluaran)					
							Jumlah penyandang cacat (Paca) dan Eks trauma yang mendapat daya guna	orang	138	138	100,00	
							3. Outcome (Hasil)					
							Meningkatnya peran	orang	138	138	100,00	

							penyangang cacat (Paca) dan eks trauma					
							4. Benefit :					
							- Meningkatnya aktifitas para penyangang cacat dan eks trauma	orang	138	138	100,00	
							- Meningkatnya kesejahteraan para penyangang cacat dan eks trauma					
Program	34. Operasi dan Pemeliharaan	98,17	100,00	100,00	EFISIE N	EFEKTIF	1. Input (Masukan)					
Pembinaan Panti	Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/Jompo						Dana Yang tersedia	Rp.	101.310.000	99.454.550	98,17	
Asuhan/Panti												
Jompo							2. Output(Keluaran)					
							Jumlah unit Panti dipelihara	Panti Asuhan	18	18	100,00	

							Panti Asuhan					
							3. Outcome (Hasil)					
							Meningkatnya Operasional Panti Asuhan/Panti Jompo	Panti Asuhan	18	18	100,00	
Program	35. Pendidikan dan	98,92	100,00	100,00	EFISIE N	EFEKTIF	1. Input (Masukan)					
Pembinaan Eks	Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Eks						Dana yang dibutuhkan, instruktur dan bahan pelatihan	Rp.	42.080.000	41.625.250	98,92	
Penyandang	Penyandang						2. Output(Keluaran)					
Penyakit Sosial	Penyakit Sosial						Eks napi yang mendapatkan bantuan UEP dan mengikuti diklat	orang	10	10	100,00	
(Eks Napi, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya)							3. Outcome (Hasil)					
							Meningkatnya	orang	10	10	100,00	

							keterampilan eks napi					
							4. Benefit (Manfaat) :					
							Meningkatnya kesejahteraan eks napi	orang	10	10	100,00	
	36. Pemberdaya an Eks	91,92	83,33	83,33	EFISIE N	EFEKTIF	1. Input (Masukan)					
	penyangg penyakit						Dana Yang tersedia, Tenaga Kerja 2 Orang	Rp.	63.280.000	58.169.2 00	91,92	
	sosial.											
							2. Output(Keluara n)					
							Jumlah Eks Penyangg Penyakit Sosial yang diberdayakan, pemulangan gepeng	orang	60	50	83,33	
							3. Outcome (Hasil)					
							Meningkatnya keberdayaan Eks	orang	60	50	83,33	

							Penyandang Penyakit Sosial (gepeng, PSK, dll)					
							4. Benefit (Manfaat):					
							Mereka tidak lagi melakukan kegiatan menjadi gepeng, PSK dan lain-lain.	orang	60	50	83,33	
Program	37. Peningkatan peran aktif	99,81	100,00	100,00	EFISIE N	EFEKTIF	1. Input (Masukan)					
pemberdayaan kelembagaan	masyarakat dan dunia usaha.						Dana yang dibutuhkan 3 narasumber, dan tenaga kerja 4 orang	Rp.	110.020.000	109.805.750	99,81	
kesejahteraan sosial							2. Output(Keluaran)					
							- Terselenggaranya penyuluhan sosial terhadap PMKS dan PSKS	Orang	210	210	100,00	
							- Terselenggaranya sosialisasi	Paket	1	1	100,00	

							pada penyelenggaraan UGB dan PUB					
							- Terselenggaranya partisipasi dunia usaha untuk membantu PMKS melalui CSR					
							3. Outcome (Hasil)					
							- Meningkatnya pemahaman tentang PMKS dan PSKS	Orang	210	210	100,00	
							- Meningkatnya pemahaman tentang penyelenggaraan GUB dan PUB	Paket	1	1	100,00	
							- Meningkatnya kepedulian dan partisipasi dunia usaha untuk membantu PMKS melalui CSR					
							4. Benefit :					

							- Meningkatkan pemahaman, kepedulian masyarakat dan dunia usaha terhadap PMKS dan PSKS	Orang	210	210	100,00	
							- Meningkatkan pemahaman tentang UGB dan PUB	Paket	1	1	100,00	
							- Meningkatkan partisipasi dunia usaha untuk membantu PMKS melalui CSR					
	38. Peningkatan jejaring	99,29	100,00	100,00	EFISIE N	EFEKTIF	1. Input (Masukan)					
	kerjasama pelaku-pelaku usaha						Dana Yang tersedia, tenaga kerja 2 orang	Rp.	89.100.000	88.468.600	99,29	
	kesejahteraan sosial						2. Output(Keluaran)					
	masyarakat						Jumlah Desa Pakraman yang bergerak dibidang Kesos	Desa Pakraman	3	3	100,00	

							3. Outcome (Hasil)					
							Meningkatnya jejaring kerjasama dengan Desa Pakraman dibidang usaha kesejahteraan sosial	Desa Pakraman	3	3	100,00	
							4. Benefit :					
							Terlaksananya peningkatan jejaring kerjasama pelaku usaha (Desa Pakraman) yang bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial	Desa Pakraman	3	3	100,00	
	39. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat.	98,09	100,00	100,00	EFISIEN	EFEKTIF	1. Input (Masukan) Dana Yang tersedia, tenaga kerja 4 orang	Rp.	109.455.000	107.367.000	98,09	

							2. Output(Keluaran)					
							Jumlah KT/PSM yang mengikuti pembinaan, bantuan Usaha Ekonomi Produktif	KT/PSM	360	360	100,00	
							3. Outcome (Hasil)					
							Meningkatnya SDM Karang Taruna (KT) dan	KT/PSM	360	360	100,00	
							Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dibidang kesejahteraan sosial					
							4. Benefit :					
							Meningkatnya kualitas SDM pada KT dan PSM	KT/PSM	360	360	100,00	
	40. Pengembangan Model	99,49	100,00	100,00	EFISIE N	EFEKTIF	1. Input (Masukan)					

	Kelembagaan					Dana yang dibutuhkan, tenaga kerja 17 orang	Rp.	155.280.000	154.490.500	99,49	
	Perlindungan Sosial										
						2. Output(Keluaran)					
						Jumlah jenis lembaga perlindungan sosial	Lemba ga	1	1	100,00	
						- Unit pelaksana PKH (UPPKH) Kabupaten					
						Buleleng					
						- Unit Pelaksanaan Askesos kabupaten					
						Buleleng					
						- Koordinasi PKH dan Askessos ke Kementerian Sosial RI					
						3. Outcome (Hasil)					
						Meningkatnya perlindungan kesosialan	Lemba ga	1	1	100,00	

Program	41. Penanaman Nilai	98,92	100,00	100,00	EFISIEN	EFEKTIF	1. Input (Masukan)					
Pelestarian	Kepahlawanan dan						Dana yang dibutuhkan, tenaga kerja 4 orang	Rp.	145.000.000	143.439.812	98,92	
Nilai	Kesetiakawanan sosial.											
Kepahlawanan							2. Output(Keluaran)					
							Jumlah jenis, kali, model penanaman nilai					
dan												
kesetiakawanan							kepahlawanan:					
Sosial							-Tatap muka keluarga veteran.	orang	400	400	100,00	
							- Peringatan HUT Bhuanan Kerta	kegiatan	1	1	100,00	
							- Peringatan Hari Pahlawan 10 Nopember	kegiatan	1	1	100,00	
							- Hari Kesetiakawanan	kegiatan	1	1	100,00	

							n Sosial Nasional					
							- Napak Tilas Perjuangan I Gusti Ngurah Rai	kegiatan	1	1	100,00	
							3. Outcome (Hasil)					
							Meningkatnya Pemahaman kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	%	100	100	100,00	
	42. Pemeliharaan Taman makam Pahlawan (TMP) dan Monumen/Tugu Perjuangan	99,84	100,00	100,00	EFISIEN	EFEKTIF	1. Input (Masukan)					
							Dana yang dibutuhkan, tenaga kerja 10 orang	Rp.	1.032.972.000	1.031.308.950	99,84	
							2. Output(Keluaran)					
							Jumlah unit TMP Qurastana dan Monumen/ Tugu Perjuangan dipelihara	monumen	4	4	100,00	

Singaraja, 07 Januari 2015

**Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Buleleng,**

Drs. Gede Komang, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip. 19591231 198503 1 212

